

The logo of Tabalong Regency is a shield-shaped emblem. At the top, the word "TABALONG" is written in a bold, sans-serif font. Below the text is a central shield with a yellow background, featuring a black silhouette of a building with a white star above it. To the left of the shield is a green palm tree, and to the right is a yellow chain. At the bottom of the shield, a red banner with white text reads "KARAGA KARU". Below the banner are two crossed white swords. The entire emblem is set against a green background with a yellow border.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, yang disusun dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen ini merupakan bentuk komitmen bersama yang dilandasi oleh nilai dan norma organisasi, serta dirumuskan melalui proses partisipatif yang mencerminkan pemahaman dan pandangan tentang arah pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang.

Renstra ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong guna mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta berkontribusi secara langsung dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Tanjung, 20 Agustus 2025

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
KABUPATEN TABALONG,



Ir. ROWI RAWATIANICE, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661125 199403 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10
2.1 Gambaran Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10
2.1.2 Sumberdaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	13
2.1.3 Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	29
2.1.5 Kerjasama Daerah yang Dilaksanakan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	30
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	32
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	32
2.2.2 Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	39
2.2.3 Internalisasi SDGs Ke dalam Dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	41

BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.....	43
3.1	Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ...	43
3.2	Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	43
3.3	Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	46
3.4	Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	49
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
	PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
4.1	Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	53
4.2	Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	57
4.3	Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	95
4.4	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	98
BAB V	PENUTUP	101

DAFTAR TABEL

2.1	Jumlah pegawai menurut pangkat, golongan dan ruang.....	14
2.2	Jumlah pegawai menurut pendidikan dan pelatihan struktural	15
2.3	Daftar prasarana dan sarana di Disdukcapil Kabupaten Tabalong	15
2.4	Pencapaian kinerja pelayanan Disdukcapil Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2024	19
2.5	Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Disdukcapil Kabupaten Tabalong Tahun 2021 - 2024	21
2.6	Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2022-2025	31
2.7	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tabalong 2025-2030	37
2.8	Penyusunan Isu-Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40
2.9	Internalisasi SDGs	42
3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	44
3.2	Tahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	47
3.3	Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	50
4.1	Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Tabalong	54
4.2	Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rancangan Akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	58
4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	75
4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	95
4.5	Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	99
4.6	Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	100

DAFTAR GAMBAR

1. Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.....	12
2. Komposisi pegawai menurut jenis kelamin	13
3. Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 272 ayat 1 berbunyi "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD". Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah "Dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi".

Sebagaimana disebutkan pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (29) bahwa "Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun" dan lebih lanjut, penyusunan dokumen ini mengikuti arahan intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Dearah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka penyusunan Renstra didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029. Dengan dasar tersebut, disusunlah Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Tabalong Tahun 2025 – 2029 (selanjutnya disebut Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 ini, peraturan yang menjadi landasan hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020- 2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1205);
17. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 468);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 44);

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor

kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuannya sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan kebijakan dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi Disdukcapil sebagai unit kerja pelayanan.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
3. Menjadi acuan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana Pasal 119 ayat (3) disebutkan bahwa "Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111". Pasal 111 menyebutkan bahwa "penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Pelayanan Perangkat Dearah;
- c. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Dearah;
- d. Tujuan dan Sasaran;
- e. Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. Program, Kegiatan , Sub Kegiatan Perangkat Daerah;
- g. Kinerja Penyelenggaraan Badan Urusan;
- h. Penutup.

Dengan demikian, sebagaimana penjelasan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, maka Rencana Strategis Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- 2.1 Gambaran Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 2.1.2 Sumberdaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 2.1.3 Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 2.1.5 Kerjasama Daerah yang Dilaksanakan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis
 - 2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 2.2.2 Penentuan Isu-Isu Strategis
 - 2.2.3 Internalisasi SDGs ke dalam Dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- 3.1 Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029;
- 3.2 Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029;
- 3.3 Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029;
- 3.4 Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mencapai tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program;
- 4.2 Uraian Kegiatan;
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif;
- 4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;
- 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1. Gambaran Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

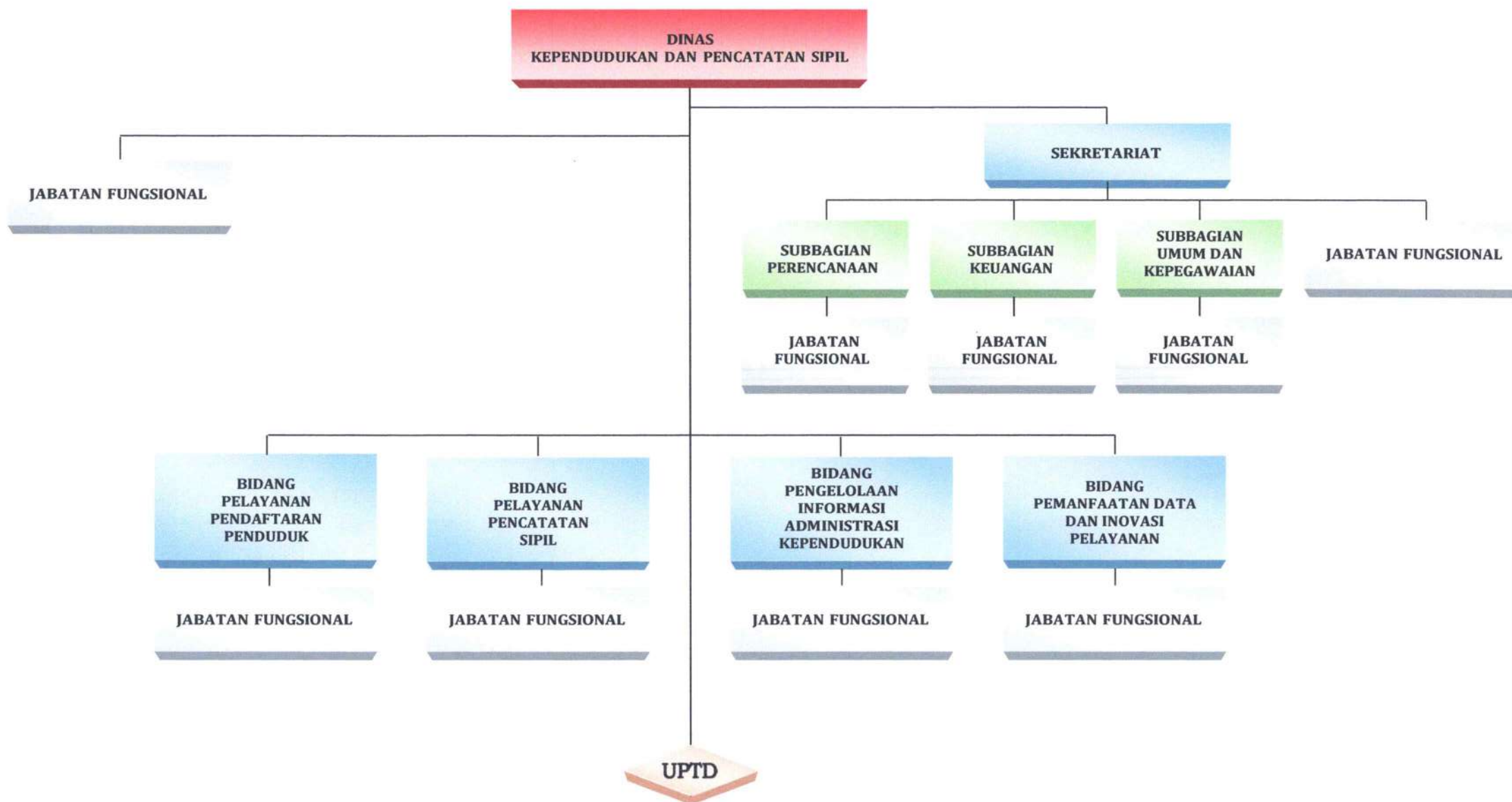
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati Tabalong mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
- f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, susunan organisasi Disdukcapil Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

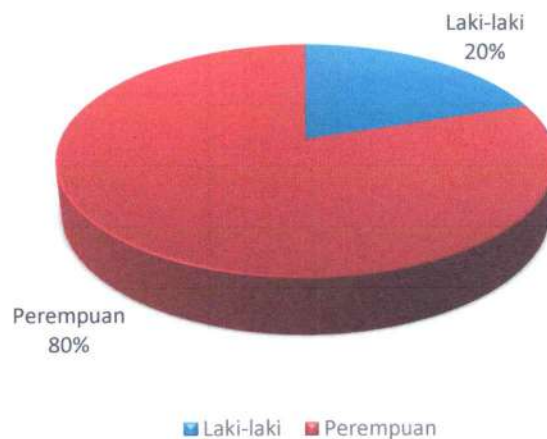
- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Jabatan Fungsional



Gambar 1. Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong

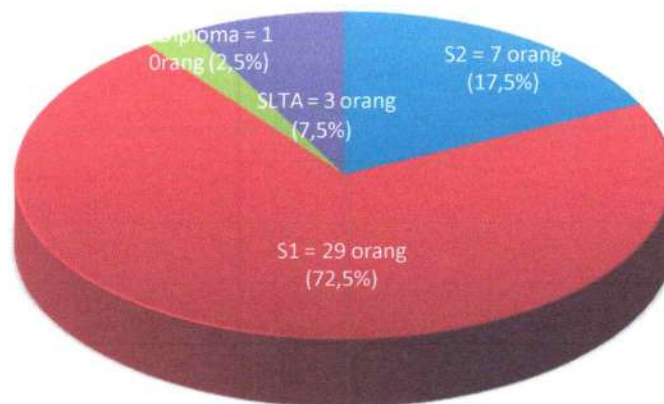
2.1.2 Sumberdaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumberdaya manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tabalong berjumlah 40 orang. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki sebanyak 8 orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 32 orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin tersebut diilustrasikan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Komposisi pegawai menurut jenis kelamin

Dari jumlah pegawai tersebut di atas, berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai lulusan S2 berjumlah 7 (tujuh) orang, S1 berjumlah 29 orang, Diploma berjumlah 1 (satu) orang dan SLTA berjumlah 3 (tiga) orang. Komposisi ini diperlihatkan dalam Gambar 3.



Gambar 3. Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan

Menurut pangkat, golongan dan ruang, pegawai Disdukcapil Kabupaten Tabalong terdiri dari Pembina Utama Muda (IV/c) berjumlah 1 (satu) orang, Pembina Tingkat I (IV/b) berjumlah 1 (satu) orang dan Pembina (IV/a) berjumlah 5 (lima) orang. Untuk Penata Tingkat I (III/d) sebanyak 6 (enam) orang, Penata (III/c) sebanyak 2 (dua) orang, Penata Muda Tingkat I (III/b) sebanyak 2 (dua) orang, Penata Muda (III/a) sebanyak 6 (lima) orang dan golongan IX (PPPK) 16 orang. Gambaran jumlah pegawai tersebut ditampilkan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Jumlah pegawai menurut pangkat, golongan dan ruang

No.	Pangkat, Golongan dan Ruang	Jumlah (Orang)	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1.	Pembina (IV/a)	5	2	3
	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	1	-
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-
	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-
	Jumlah	7	3	4
2.	Penata Muda (III/a)	6	2	4
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2	1	1
	Penata (III/c)	2	0	2
	Penata Tingkat I (III/d)	7	1	6
	Jumlah	17	4	13
3.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	-	-
	Pengatur (II/c)	-	-	-
	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	-	-
	Golongan IX (PPPK)	16	2	14
	Jumlah	16	2	14
4.	Juru muda (I/a)	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	-	-
	Juru (I/c)	-	-	-
	Juru Tingkat I (I/d)	-	-	-
	Jumlah	40	8	32

Selanjutnya, berdasarkan susunan organisasi Disdukcapil Kabupaten Tabalong, jabatan struktural yang terisi berjumlah 10 (sepuluh) jabatan yang terdiri dari 1 (satu) jabatan Eselon II/a, 1 (satu) jabatan Eselon III/a, 4 (empat) jabatan Eselon III/b dan 4 (empat) jabatan Eselon IV/a. Dari jumlah jabatan tersebut, yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural atau Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Diklatpim II dan 6 (enam) orang Diklatpim IV. Jumlah pegawai menurut pendidikan dan pelatihan struktural tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Jumlah pegawai menurut pendidikan dan pelatihan struktural

No.	Jenis Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Jumlah (Orang)
1.	DIKLATPIM II	1
2.	DIKLATPIM III	2
3.	DIKLATPIM IV	7
	Jumlah	10

Selain itu, ketersediaan prasarana dan sarana juga merupakan unsur yang sangat penting selain sumberdaya manusia yang profesional sebab merupakan pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Tabalong. Kondisi prasarana dan sarana yang dimiliki sampai saat ini cukup memadai, adapun jumlahnya disajikan dalam Tabel 2.3

Tabel 2.3
Daftar prasarana dan sarana di Disdukcapil Kabupaten Tabalong

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	6 Buah
2.	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	1 Buah
3.	Kendaraan Dinas Operasional Double Cabin	2 Buah
4.	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	16 Buah
5.	Komputer PC	36 Buah
6.	Laptop	26 Buah
7.	Notebook	14 Buah

8.	Personal Komputer Lain-lain	57 Buah
9.	CPU	12 Buah
10.	Printer	98 Buah
11.	Mesin Pemotong Biasa	5 Buah
12.	Mesin Laminating	9 Buah
13.	Mesin Tik Standar	1 Buah
14.	Mesin Tik Portable	1 Buah
15.	Mesin Tik Elektronik	1 Buah
16.	Meja Rapat	1 Buah
17.	Meja Komputer	25 Buah
18.	Meja Kerja	4 Buah
19.	Meja Eselon II	1 Buah
20.	Meja Eselon III	7 Buah
21.	Meja Eselon IV	8 Buah
22.	Meja Rapat Eselon II	1 Buah
23.	Meja Ruang Tamu	4 Buah
24.	Meja Besi	1 Buah
25.	Kursi Rapat	30 Buah
26.	Kursi Kayu	1 Buah
27.	Kursi Besi	1 Buah
28.	Kursi Kerja	11 Buah
29.	Kursi Lipat	30 Buah
30.	Kursi Tamu	4 Buah
31.	Bangku Tunggu	1 Buah
32.	Kursi Eselon II	1 Buah
33.	Kursi Eselon III	9 Buah
34.	Kursi Eselon IV	11 Buah
35.	Lemari Besi	10 Buah
36.	Rak Besi	12 Buah
37.	Rak Kaca	1 Buah
38.	Brankas	1 Buah
39.	AC Split	25 Buah
40.	Kipas Angin	5 Buah
41.	Dispenser	4 Buah
42.	Lemari Es	11 Buah
43.	Lemari Kaca	6 Buah
44.	Lemari Kayu	1 Buah
45.	Lemari Arsip	14 Buah
46.	Karpet	3 Buah
47.	Speaker	1 Buah
48.	Speaker Aktif Komputer	2 Buah
49.	Sound System	4 Buah
50.	Betacam Recorder	1 Buah
51.	Layar Proyektor	3 Buah
52.	Gorden	2 Buah
53.	Camera Film	20 Buah
54.	Webcam	3 Buah
55.	Handy Talky	4 Buah

56.	Alat Komunikasi Radio HF/HM	2 Buah
57.	Peralatan Komunikasi Radio UHF	23 Buah
58.	Peralatan Translator UHF	1 Buah
59.	Program Input Equipment	1 Buah
60.	Engine Running in Tester	1 Buah
61.	Dryer	1 Buah
62.	Portable Wind System	1 Buah
63.	Tripod	3 Buah
64.	CCTV	1 Buah
65.	TV	9 Buah
66.	Vacuum Cleaner	2 Buah
67.	Mesin Absensi / Presensi	3 Buah
68.	Pesawat Telepon	1 Buah
69.	Handphone Android	7 Buah
70.	Server	2 Buah
71.	Router	3 Buah
72.	Harddisk	6 Buah
73.	Tang	2 Buah
74.	Keyboard	5 Buah
75.	Scanner	12 Buah
76.	Perkakas Konstruksi Logam	2 Buah
77.	TV IF Signal Generator	2 Buah
78.	Wireless	7 Buah
79.	Stabilisator	1 Buah
80.	Flashdisc	10 Buah
81.	UPS	34 Buah
82.	Hub	1 Buah
83.	Modem	9 Buah
84.	Genset	5 Buah
85.	Test Intelegencia Blac Pass	1 Buah
86.	Papan Visual	2 Buah
87.	Papan Nama Ruangan/Jabatan	1 Buah
88.	Alat Penghancur Kertas	2 Buah
89.	Alat Pemotong Kertas	5 Buah
90.	Alat Kantor Lainnya	17 Buah
91.	Alat Rumah Tangga Lainnya	7 Buah
92.	Alat Keamanan Lainnya	1 Buah
93.	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	2 Buah
94.	Papan Pengumuman	1 Buah
95.	Tangga	1 Buah
96.	Peralatan Jaringan Lain-lain	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berhubungan dengan tugas dan fungsi, kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tahun 2019-2024 telah menunjukkan hasil yang optimal, hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama yang hampir mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4

Pencapaian kinerja pelayanan Disdukcapil Kabupaten Tabalong Tahun 2020 - 2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Disdukcapil	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Disdukcapil Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	-	✓	-	99,75	100	100	100	100	99,05	99,05	98,03	98,24	99,42	99,30	99,05	98,03	98,24	99,42
2.	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	-	-	✓	100	100	100	100	100	99,52	99,60	99,60	99,89	99,64	99,52	99,60	99,60	99,89	99,64
3.	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	-	✓	-	75	55	70	85	100	23,73	45,97	60,44	72,47	78,94	31,64	83,58	86,34	85,26	78,94
4.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	-	-	✓	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	100	100	100	100	100
5.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran per-1000 Penduduk	-	-	✓	87	55	60	65	70	53,33	54,62	63,50	61,59	63,89	61,30	99,31	105,83	94,75	91,27
6.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun	-	✓	-	95,50	96	97	98	100	92,48	93,28	98,15	98,60	99,00	96,84	97,17	101,19	100,61	99,00
7.	Persentase Kepemilikan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan	-	-	✓	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua Pasangan yang Perkawinannya Dilaporkan	-	-	✓	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9.	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian pada semua Individu yang Percerainnya Dilaporkan	-	-	✓	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10.	Persentase Validitas Database Kependudukan	-	-	✓	100	100	100	100	100	97,45	99,20	99,80	100	100	97,94	99,60	99,80	100,20	100
11.	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	-	-	✓	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
12.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	-	✓	Puas (85,00)	Puas (85,00)	Puas (87,00)	Puas (90,00)	Puas (92,00)	Puas (85,75)	Sangat Puas (89,63)	Sangat Puas (90,02)	Sangat Puas (91,58)	Sangat Puas (92,27)	100,88	105,45	103,47	101,76	98,97
13.	Cakupan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	-	✓	-	100	100	100	100	100	100	100	11,11	22,22	22,22	100	100	11,11	22,22	22,22
14.	Nilai Evaluasi AKIP	-	-	✓	BB (76,00)	BB (78,00)	BB (80,00)	A (82,00)	A (85,00)	BB (77,28)	BB (77,45)	BB (77,57)	BB (79,60)	A (80,40)	101,68	99,29	96,96	97,07	93,65

Dalam rangka pencapaian target kinerja tersebut di atas, maka terdapat pendanaan atas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2020 – 2024 disajikan dalam Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Disdukcapil Kabupaten Tabalong Tahun 2020 – 2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11.572.229.199,00	7.148.034.048,00	6.535.016.560,00	10.964.593.000,00	14.946.573.868,00	10.192.355.984,00	6.033.732.276,00	6.130.459.590,00	9.528.197.835,00	14.298.523.439,00	88,08%	84,41%	93,81%	86,90%	95,66%	6,61%	8,83%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	11.572.229.199,00	7.148.034.048,00	6.535.016.560,00	10.964.593.000,00	14.946.573.868,00	10.192.355.984,00	6.033.732.276,00	6.130.459.590,00	9.528.197.835,00	14.298.523.439,00	88,08%	84,41%	93,81%	86,90%	95,66%	6,61%	8,83%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.045.710.531,00	6.333.330.126,00	5.988.637.476,00	8.276.028.262,00	11.087.075.630,00	930.683.366,00	5.588.812.276,00	5.666.740.077,00	7.301.467.733,00	10.340.738.333,00		88,24%	94,62%	88,22%	93,27%	-1,06%	0,36%
PROGRAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	11.572.229.199,00					10.192.355.984,00					88,08%						
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	12.900.000,00					9.418.750,00					73,01%						
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		55.022.512,00	8.284.995,00	25.515.800,00	8.990.080,00		40.416.500,00	3.608.700,00	5.580.700,00	8.346.700,00		73,45%	43,56%	21,87%	92,84%	-8,63%	-2,98%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (DAK Non Fisik - Dana Yanmuduk)		16.200.000,00	0,00	0,00	0,00		3.600.000,00	0,00	0,00	0,00		22,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		11.072.512,00	8.284.995,00	25.515.800,00	8.990.080,00		9.066.500,00	3.608.700,00	5.580.700,00	0,00		81,88%	43,56%	21,87%	0,00%	0,00%	0,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DAK Non Fisik - Dana Yanmuduk)		27.750.000,00	0,00	0,00	0,00		27.750.000,00	0,00	0,00	0,00		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Gaji dan Tunjangan	2.568.000.000,00					2.404.453.419,00					93,63%						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.690.800.000,00	2.730.130.000,00	4.839.544.588,00	5.590.590.000,00		2.503.506.731,00	2.675.266.904,00	4.165.711.022,00	5.329.264.157,00		93,04%	97,99%	86,08%	95,33%	21,47%	22,01%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.684.000.000,00	2.730.130.000,00	4.839.544.588,00	5.590.590.000,00		2.496.706.731,00	2.675.266.904,00	4.165.711.022,00	5.329.264.157,00		93,02%	97,99%	86,08%	95,33%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		6.800.000,00	0,00	0,00	0,00		6.800.000,00	0,00	0,00	0,00		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	123.249.000,00	0,00	27.792.000,00	103.750.000,00	0,00	111.298.200,00	0,00	0,00	65.095.000,00	0,00%	90,30%	0,00%	0,00%	62,74%	0,00%	0,00%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.720.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,99%	0,00%	0,00%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (DAK Non Fisik - Dana Yamininduk)	0,00	113.249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.998.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	90,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	10.000.000,00	0,00	27.792.000,00	55.000.000,00	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	31.375.000,00	0,00%	93,00%	0,00%	0,00%	57,05%	0,00%	0,00%
Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran	434.161.500,00					364.063.026,00					83,85%						
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja dan Perkantoran	423.225.000,00					383.662.000,00					90,65%						
Rapat-rapat Koordinasi	188.324.031,00					182.958.340,00					97,15%						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.045.710.531,00	1.071.452.037,00	1.390.929.126,00	1.369.666.689,00	2.370.579.025,00	930.683.366,00	971.838.017,00	1.244.450.405,00	1.242.883.126,00	2.486.501.859,00	89,00%	90,70%	89,47%	90,74%	104,89%	22,70%	27,85%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3.148.090,00	5.211.858,00	7.298.452,00	8.539.560,00		3.135.400,00	4.710.700,00	7.205.000,00	1.140.000,00		99,60%	90,38%	98,72%	13,35%	0,00%	0,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAD; DAK Non Fisik - Dana Yasminduk)		810.775.287,00	0,00	0,00	0,00		731.967.610,00	0,00	0,00	0,00		90,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0,00	881.949.356,00	907.956.304,00	1.308.111.613,00		0,00	793.064.593,00	799.421.143,00	1.570.303.618,00		0,00%	89,92%	88,05%	120,04%	0,00%	0,00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		16.858.484,00	23.272.768,00	909.091,00	517.388.438,00		12.772.000,00	22.509.568,00	0,00	365.114.000,00		75,76%	96,72%	0,00%	70,57%	0,00%	0,00%
Penyediaan Barang Cetakan dan		27.260.622,00	48.700.892,00	30.239.230,00	94.271.414,00		26.469.500,00	40.373.900,00	27.870.200,00	18.919.400,00		97,10%	82,90%	92,17%	20,07%	0,00%	0,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		5.747.599,00	5.358.252,00	6.994.612,00	3.660.000,00		3.120.000,00	4.505.000,00	5.064.000,00	6.022.000,00		54,28%	84,08%	72,40%	164,54%	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (PAD; DAK Non Fisik - Dana Yasminduk)		207.661.955,00	0,00	0,00	0,00		194.373.507,00	0,00	0,00	0,00		93,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0,00	426.436.000,00	416.269.000,00	438.608.000,00		0,00	379.286.644,00	403.322.783,00	525.002.841,00		0,00%	88,94%	96,89%	119,70%	0,00%	0,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	0,00	86.454.045,00	0,00	0,00	760.530.406,00	0,00	85.930.000,00	0,00	0,00	511.450.000,00	0,00%	99,39%	0,00%	0,00%	67,25%	0,00%	0,00%
Pengadaan Mebel	0,00	86.454.045,00	0,00	0,00	740.530.406,00	0,00	85.930.000,00	0,00	0,00	511.450.000,00	0,00%	99,39%	0,00%	0,00%	69,07%	0,00%	0,00%
Pengadaan Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	1.782.152.400,00	1.411.691.362,00	1.805.659.702,00	1.969.116.119,00	0,00	1.596.679.030,00	1.364.598.433,00	1.709.276.415,00	1.669.885.601,00	0,00%	89,59%	96,66%	94,66%	84,80%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (PAD; DAK Non Fisik - Dana Yanmindak)	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	68,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	439.680,00	116.200,00	57.700,00	0,00%	0,00%	87,94%	19,37%	9,62%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	129.000.000,00	81.615.000,00	13.700.000,00	158.000.000,00	0,00	94.207.000,00	79.046.253,00	8.316.355,00	7.551.496,00	0,00%	73,03%	96,85%	60,70%	4,78%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PAD; DAK Non Fisik - Dana Yanmindak)	0,00	1.651.652.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.444.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	90,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	1.329.576.362,00	1.791.359.702,00	1.810.516.119,00	0,00	0,00	1.285.112.500,00	1.700.843.860,00	1.662.276.405,00	0,00%	0,00%	96,66%	94,95%	91,81%	0,00%	0,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja dan Perkantoran	227.110.137,00					189.655.533,00					83,51%						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		524.200.132,00	447.601.993,00	207.849.483,00	283.520.000,00		279.143.798,00	378.815.635,00	178.016.470,00	270.195.016,00		53,25%	84,63%	85,65%	95,30%	5,70%	9,25%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertninan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		195.968.169,00	204.072.864,00	186.356.509,00	258.550.000,00		107.492.298,00	145.225.135,00	162.746.470,00	263.160.016,00		54,85%	71,16%	87,33%	101,78%	0,00%	0,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		15.764.106,00	31.067.288,00	11.909.093,00	24.970.000,00		11.659.500,00	22.960.000,00	6.360.000,00	7.035.000,00		73,96%	73,90%	53,40%	28,17%	0,00%	0,00%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		312.467.857,00	212.461.841,00	9.583.881,00	0,00		159.992.000,00	210.630.500,00	8.910.000,00	0,00		51,20%	99,14%	92,97%	0,00%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.458.081.000,00	80.403.000,00	0,00	143.432.500,00	356.504.264,00	1.198.839.350,00	54.027.000,00	0,00	74.506.647,00	297.372.914,00	82,22%	67,20%	0,00%	51,95%	83,41%	-29,68%	-29,43%
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.143.446.000,00					911.680.350,00					79,73%						
Pengelolaan Pendataan Penduduk	314.635.000,00					287.159.000,00					91,27%						
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.458.081.000,00	80.403.000,00	0,00	132.897.500,00	348.224.264,00	1.198.839.350,00	54.027.000,00	0,00	72.616.647,00	291.942.914,00	82,22%	67,20%	0,00%	54,64%	83,84%	-30,09%	-29,75%
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		27.693.000,00	0,00	12.980.000,00	65.550.000,00		18.112.000,00	0,00	11.174.000,00	13.050.000,00		65,40%	0,00%	86,09%	19,91%	0,00%	0,00%
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		0,00	0,00	13.845.000,00	19.901.400,00		0,00	0,00	3.900.000,00	7.110.000,00		0,00%	0,00%	28,17%	35,73%	0,00%	0,00%
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (PAD; DAK Non Fisik - Dana Yaniminduk)		52.710.000,00	0,00	0,00	0,00		35.915.000,00	0,00	0,00	0,00		68,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		0,00	0,00	106.072.500,00	242.801.864,00		0,00	0,00	57.542.647,00	271.446.914,00		0,00%	0,00%	54,25%	111,80%	0,00%	0,00%
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		0,00	0,00	0,00	19.971.000,00		0,00	0,00	0,00	336.000,00		0,00%	0,00%	0,00%	1,68%	0,00%	0,00%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	0,00	0,00	0,00	10.535.000,00	8.280.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	5.430.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	17,94%	65,58%	0,00%	0,00%
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	0,00	0,00	0,00	10.535.000,00	8.280.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	5.430.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	17,94%	65,58%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	65.358.000,00	92.877.953,00	0,00	151.804.000,00	153.650.000,00	33.876.000,00	55.585.000,00	0,00	79.180.000,00	63.080.000,00	51,83%	59,85%	0,00%	52,16%	41,05%	23,83%	16,82%
Pelayanan Pencatatan Sipil	54.025.000,00					29.231.000,00					54,11%						
Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	11.333.000,00					4.645.000,00					40,99%						
Pelayanan Pencatatan Sipil	65.358.000,00	92.877.953,00	0,00	147.304.000,00	135.680.000,00	33.876.000,00	55.585.000,00	0,00	79.180.000,00	54.980.000,00	51,83%	59,85%	0,00%	53,75%	40,52%	20,03%	12,87%
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		92.877.953,00	0,00	0,00	24.300.000,00		55.585.000,00	0,00	0,00	11.550.000,00		59,85%	0,00%	0,00%	47,53%	0,00%	0,00%
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		0,00	0,00	147.304.000,00	111.380.000,00		0,00	0,00	79.180.000,00	43.430.000,00		0,00%	0,00%	53,75%	38,99%	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,19%	0,00%	0,00%
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,19%	0,00%	0,00%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	79,59%	0,00%	0,00%
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	79,59%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	700.827.000,00	601.063.906,00	517.346.861,00	2.368.112.603,00	3.285.813.974,00	676.438.500,00	295.551.600,00	444.142.613,00	2.051.372.675,00	3.528.237.023,00	96,52%	49,17%	85,85%	86,62%	107,38%	47,15%	51,12%
Peningkatan Inovasi Pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat	243.014.000,00					233.738.000,00					96,18%						
Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	7.108.000,00					7.005.000,00					98,55%						
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	250.122.000,00	24.999.840,00	248.477.472,00	66.030.400,00	49.639.802,00	240.743.000,00	22.844.000,00	218.504.757,00	32.256.756,00	53.758.542,00	96,25%	91,38%	87,94%	48,85%	108,30%	-33,25%	-31,26%
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		0,00	248.477.472,00	66.030.400,00	49.639.802,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		24.999.840,00	248.477.472,00	66.030.400,00	49.639.802,00		24.999.840,00	218.504.757,00	32.256.756,00	53.758.542,00		100,00%	87,94%	48,85%	108,30%	0,00%	0,00%
Implementasi SIAK (membangun, memelihara dan updating)	372.951.000,00					361.876.500,00					97,03%						
Pengelolaan Data dan Informasi Administrasi Kependudukan	77.754.000,00					73.819.000,00					94,94%						
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	450.705.000,00	553.566.054,00	268.869.389,00	287.214.746,00	261.404.562,00	435.695.500,00	252.597.600,00	225.637.856,00	247.509.391,00	138.067.840,00	96,67%	45,63%	83,92%	86,18%	52,82%	-12,73%	-24,97%
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		553.566.054,00	208.331.159,00	244.237.290,00	221.654.554,00		553.566.054,00	179.372.856,00	210.557.231,00	84.598.763,00		100,00%	86,10%	86,21%	38,17%	0,00%	0,00%
Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		0,00	60.538.230,00	42.977.456,00	39.750.008,00		0,00	46.265.000,00	36.952.160,00	53.469.077,00		0,00%	76,42%	85,98%	134,51%	0,00%	0,00%
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0,00	22.498.012,00	0,00	2.014.867.457,00	2.974.769.610,00	0,00	20.110.000,00	0,00	1.771.606.528,00	3.336.410.641,00	0,00%	89,39%	0,00%	87,93%	112,16%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0,00	22.498.012,00	0,00	1.855.581.844,00	2.749.551.396,00	0,00	20.110.000,00	0,00	1.619.096.128,00	3.092.126.063,00	0,00%	89,39%	0,00%	87,26%	112,46%	0,00%	0,00%
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0,00	0,00	0,00	159.285.613,00	225.218.214,00	0,00	0,00	0,00	152.510.400,00	244.284.578,00	0,00%	0,00%	0,00%	95,75%	108,47%	0,00%	0,00%
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	0,00	40.359.063,00	29.032.223,00	25.215.635,00	63.530.000,00	0,00	39.756.400,00	19.576.900,00	21.670.780,00	69.095.169,00	0,00%	98,51%	67,43%	85,94%	108,76%	0,00%	0,00%
Penyusunan Profil Kependudukan	0,00	40.359.063,00	29.032.223,00	25.215.635,00	63.530.000,00	0,00	39.756.400,00	19.576.900,00	21.670.780,00	69.095.169,00	0,00%	98,51%	67,43%	85,94%	108,76%	0,00%	0,00%
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	0,00	40.359.063,00	29.032.223,00	25.215.635,00	63.530.000,00	0,00	39.756.400,00	19.576.900,00	21.670.780,00	69.095.169,00	0,00%	98,51%	67,43%	85,94%	108,76%	0,00%	0,00%

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan tugas dan fungsi, sasaran layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tahun 2025-2029 meliputi semua dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu :

Layanan Pendaftaran Penduduk :

1. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga
2. Pelayanan Penerbitan Biodata Penduduk
3. Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)
4. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)
5. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Orang Asing (SKPOA)
6. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Ke Luar Negeri (SKPLN)
7. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal Bagi Warga Negara Asing (SKTT)
8. Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
9. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran
10. Pencatatan dan Penerbitan Akta kematian
11. Pencatatan dan Penerbitan Akta perkawinan
12. Pencatatan dan Penerbitan Akta perceraian
13. Pencatatan pengesahan anak
14. Pencatatan pengakuan anak
15. Pencatatan pengangkatan anak
16. Pencatatan perubahan nama
17. Perubahan status kewarganegaraan
18. Penerbitan Pencatatan Sipil
19. Pembatalan akta perkawinan
20. Pembatalan akta perceraian
21. Pembetulan akta pencatatan sipil
22. Pembatalan akta pencatatan sipil
23. Peristiwa penting lainnya
24. Lahir mati

- 25. Layanan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan bagi perangkat daerah dan mitra kerja
- 26. Layanan survey kepuasan masyarakat
- 27. Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2.1.5 Kerjasama Daerah yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong segera melaksanakan kerjasama daerah sesuai dengan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Kerja Sama Daerah dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 369 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku peraturan sebelumnya, yaitu PP Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah juga dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antar daerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Kerjasama Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025

No	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Mitra Kerja sama	Urusan Pemerintahan	Program	Kegiatan	Potensi (Objek yang dikerjasamakan)	Keluaran (Output)	Hasil (Outcome)	Jenis Kerja Sama Daerah	Pelaksanaan (Tahun)	Dukungan yang diperlukan	Permasalahan/ kendala yang dihadapi	Solusi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rumah Umum Daerah Ulin Banjarmasin	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Layanan pembuatan AKTA, KK dan KIA bagi pasien ibu melahirkan (warga Tabalong)	Dokumen Kependudukan	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Pelayanan Dokumen Adminduk	2025	APBD, SDM			

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong memiliki peran yang sangat penting yakni menyelenggarakan fungsi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Tabalong. Rumusan rencana strategis dimaksud dilakukan melalui perumusan kebijakan yang tepat untuk memastikan bahwa visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud selama periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong untuk periode 2025-2029 memberi arah yang berfokus bagi seluruh pemangku kepentingan, utamanya pemerintahan daerah Kabupaten Tabalong. Visi Kabupaten Tabalong sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Tabalong 2025-2029. Pernyataan visi ini juga selaras dan dalam rangka melaksanakan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tabalong sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Tabalong.

Mempedomani hal-hal yang diuraikan diatas, maka ditetapkan visi Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, adalah:

MENUJU TABALONG SMaRT

(SEJAHTERA, MAJU, RELIGIUS DAN TERDEPAN)

Makna dari pernyataan visi tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Kabupaten Tabalong Sejahtera; Menggambarkan kondisi masyarakat Tabalong yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang stabil.

Kabupaten Tabalong Maju; Menunjukkan Kabupaten Tabalong

berupaya untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya untuk mewujudkan kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia.

Kabupaten Tabalong Religius; Tabalong berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan sosial yang harmonis, berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan yang kuat dengan menegaskan pentingnya nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan.

Kabupaten Tabalong Terdepan; Tabalong bercita-cita untuk menjadi pelopor, menjadi yang terbaik atau unggul dalam berbagai aspek, baik dalam hal pelayanan publik, inovasi, pendidikan, maupun pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, **"TABALONG SMaRT"** adalah visi untuk menciptakan sebuah daerah yang sejahtera, berkembang dengan pesat, memiliki landasan religius yang kuat, dan selalu berada di garis terdepan dalam inovasi dan kemajuan. Visi ini mencerminkan Kabupaten Tabalong untuk menjadi daerah yang holistik dalam pembangunan, di mana kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, nilai-nilai religius, dan posisi unggul dalam berbagai aspek kehidupan menjadi fokus utama.

2. Misi

Pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong dilaksanakan melalui 4 (empat) misi, yaitu :

2.1. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera.

Misi ini merupakan upaya untuk menciptakan kondisi di mana masyarakat Kabupaten Tabalong dapat hidup dengan kualitas yang baik, menikmati stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya, serta memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar, layanan publik, dan peluang pengembangan diri. Fokus utama adalah menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, keberlanjutan

lingkungan, dan kehidupan yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai lokal yang religius dan inklusif.

Langkah-langkah yang diupayakan untuk mengembangkan daerah yang religius;

- a) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
- b) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan Masyarakat; dan
- c) Mengembangkan program-program yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat, termasuk pemberdayaan UMKM dan pertanian.

2.2. Mendorong Kemajuan Daerah.

Misi ini melakukan berbagai upaya strategis, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memajukan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di Kabupaten Tabalong. Tujuan utama adalah menciptakan daerah yang maju, berdaya saing, dan mampu mengoptimalkan potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi **"Tabalong yang SMaRT"** (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan).

Langkah-langkah yang diupayakan untuk mendorong kemajuan daerah;

- a) Membangun infrastruktur yang modern dan memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b) Memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, dan pengembangan industri lokal; dan
- c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

2.3. Mengembangkan Kehidupan yang Religius.

Misi ini merupakan upaya sistematis untuk membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, menerapkan ajaran keimanan dalam kehidupan sehari-hari, serta menciptakan harmoni sosial berbasis toleransi dan keberagaman. Hal ini bertujuan menjadikan religiusitas sebagai fondasi dalam membangun karakter masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

Langkah-langkah yang diupayakan untuk mengembangkan daerah yang religius;

- a. Menjaga dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat, serta mendorong kerukunan antar umat beragama;
- b. Memfasilitasi kegiatan keagamaan dan sosial yang mendukung pengembangan moral dan spiritual masyarakat; dan
- c. Mengintegrasikan nilai-nilai religius dalam kebijakan pembangunan daerah, sehingga setiap program yang dijalankan sejalan dengan prinsip-prinsip keagamaan.

2.4. Menjadi Daerah yang Terdepan

Misi ini merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Tabalong menjadi wilayah yang unggul dan inovatif untuk bersaing dalam berbagai aspek pembangunan di tingkat regional maupun nasional. Hal ini mencakup upaya terbaik dalam memberikan layanan publik yang prima, pembangunan infrastruktur yang modern dan inklusif, serta daya saing ekonomi yang tinggi dengan tetap mempertahankan identitas lokal dengan prinsip keberlanjutan.

Langkah-langkah yang diupayakan untuk menjadi daerah yang terdepan;

- a. Menjadi pionir dalam inovasi dan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pengelolaan birokrasi daerah melalui sistem meritokrasi;

- b. Meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan potensi lokal dan memperluas jaringan kerjasama, baik di tingkat regional maupun nasional; dan
- c. Berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, dengan standar yang tinggi dalam transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas.

Adapun tema pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 yaitu :

“Penguatan Pondasi dalam Mewujudkan Pembangunan Berbasis Potensi Lokal untuk Tabalong yang Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan dengan prinsip Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Inklusif”.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tabalong 2025-2030 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong menjalankan visi yang ke – 4 (empat) pada point c yaitu Berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, dengan standar yang tinggi dalam transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Sesuai dengan tujuan RPJMD menjadi daerah yang terdepan dalam inovasi, pembangunan dan pelayanan publik dan sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan bersih dengan indikatornya Indeks Pelayanan Publik (indeks) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.7
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Tabalong 2025-2030

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline		Target				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Misi: Menjadi Daerah yang Terdepan	Menjadi daerah yang terdepan dalam inovasi, pembangunan, dan pelayanan publik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih	c. Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,49	4,51	4,53	4,55	4,57	4,59	4,61

Dalam rangka pengembangan pelayanan Disdukcapil, tantangan yang diperkirakan akan dihadapi Disdukcapil selama tahun 2025 – 2029, yaitu :

- Jumlah dan kompetensi SDM.
- Keamanan sistem informasi.
- Laju perkembangan teknologi informasi.
- Penataan arsip.
- Penguatan pengawasan.
- Kerjasama pemanfaatan data.
- Tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan

Selain tantangan tersebut di atas, peluang yang diperkirakan dapat dimanfaatkan Disdukcapil selama tahun 2025 – 2026 dalam rangka pengembangan pelayanan Disdukcapil, yaitu :

- Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM.
- Peningkatan keamanan sistem informasi.
- Penyelenggaraan pelatihan/bimbingan teknis terkait perkembangan TI.
- Transformasi arsip manual menjadi arsip digital.
- Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara intensif.
- Membangun kerjasama dengan lembaga pengguna data.
- Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dalam rangka pengembangan pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain:

1. Belum optimalnya Persentase kepemilikan kartu identitas anak.
2. Belum optimalnya Cakupan perangkat daerah yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemutakhiran data kependudukan.
4. Belum optimalnya Nilai evaluasi AKIP.

2.2.2 Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Sebelum menentukan isu-isu strategis yang harus diselesaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, perlu dilakukan analisis yang mengenai :

1. Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah
2. Permasalahan Perangkat Daerah
3. Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah
4. Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah baik Tingkat Global, Nasional maupun Regional.

Berkaitan dengan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Isu-isu yang perlu mendapat perhatian antara lain tergambar pada Tabel 2.8 di bawah ini :

Tabel 2.8 :
Penyusunan Isu-Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi semua layanan	Belum optimalnya persentase kepemilikan kartu identitas anak	Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan yang belum merata (masih ada kelompok rentan dan lansia yang belum memiliki dokumen kependudukan)	Isu lingkungan yang dinamis menciptakan tantangan yang signifikan bagi Disdukcapil dalam pencatatan kependudukan, mobilitas penduduk dan penyediaan layanan dasar. Oleh karena itu, Adaptasi sistem pencatatan yang responsif, inklusif, dan berbasis teknologi sangat diperlukan untuk mengelola dinamika populasi yang berubah-ubah	Isu lingkungan yang dinamis di Indonesia, seperti bencana alam, urbanisasi, perubahan iklim, krisis sumber daya alam, dan polusi udara, memiliki dampak yang besar pada pencatatan kependudukan dan pelayanan publik. Disdukcapil perlu beradaptasi dengan perubahan tersebut dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mendukung pencatatan penduduk yang lebih cepat dan akurat, serta bekerja sama dengan sektor lain	Isu-isu lingkungan yang dinamis ditingkat regional beragam, tergantung pada kondisi geografis dan sosial setiap daerah. Disdukcapil perlu beradaptasi dengan perubahan tersebut, dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mendukung pencatatan penduduk yang lebih cepat dan akurat, serta bekerja sama dengan sektor lain	Peningkatan persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak
Pengelolaan Data NIK (basis data lintas sektor)	Belum optimalnya Cakupan perangkat daerah yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Kurangnya SDM yang memahami pengolahan data kependudukan untuk kajian lingkungan				Peningkatan cakupan perangkat daerah yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan
Digitalisasi Layanan (inovasi pelayanan publik)	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemutakhiran data kependudukan	Tingkat partisipasi penduduk dalam program kependudukan masih rendah				Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pemutakhiran data kependudukan
Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelayanan	Belum optimalnya Nilai evaluasi AKIP	Indikator kinerja dinas belum menyentuh aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara memadai				Peningkatan nilai evaluasi AKIP

Dari permasalahan di atas, disimpulkan isu-isu strategis yang harus diselesaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

1. Peningkatan persentase kepemilikan kartu identitas anak
2. Peningkatkan cakupan perangkat daerah yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan
3. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pemutakhiran data kependudukan dan pencatatan sipil
4. Peningkatan nilai evaluasi AKIP

2.2.3 Internalisasi SDGs ke dalam Dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) merupakan komitmen global dan nasional dalam pembangunan berkelanjutan yang menyepakati 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 target. Hal ini telah menjadi agenda bersama hingga ke tingkat daerah dan daerah ikut berkomitmen dalam mendukung capaian indikator-indikator TPB/SDGs. TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Agenda pelaksanaan TPB/SDGs berlangsung hingga 2030. Harapannya, pada tahun tersebut 17 tujuan TPB/SDGs telah tercapai atau setidaknya mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Agenda pelaksanaan global TPB/SDGs berjalan beriringan dengan agenda perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun tingkat daerah. TPB/SDGs menjadi salah satu isu global yang memberikan pengaruh signifikan terhadap perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Pada dasarnya, seluruh program dan kegiatan yang dikerjakan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong secara tidak langsung sudah mengerjakan target-target dalam

TPB/SDGs meskipun antara indikator-indikator TPB/SDGs dengan indikator-indikator yang ada di SKPD berbeda. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu SKPD dengan tugas melaksanakan tujuan SDGs ke-16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh dengan target 16.9 yaitu memberikan identitas hukum untuk semua, termasuk pencatatan akta kelahiran

Bentuk konkret dari Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki program dan kegiatan pembangunan yang di dalamnya memuat pendanaan dan penganggaran. Pada periode Renstra 2025-2029, Program Program Pencatatan Sipil untuk mendukung SDGs, sebagai mana tabel berikut :

Tabel 2.9
Internalisasi SDGs

Indikator SDGs	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
8.1* Meningkatnya proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menjadi 100%	Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil
8.2* Meningkatnya persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun menjadi 100%			Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1. Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan tujuan dan sasaran yang jelas agar pemberian layanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal. Untuk mewujudkan salah satu tujuan daerah sebagaimana terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan misi ke 4 (empat) **“Menjadi Daerah yang Terdepan”** dengan tujuan daerah **“Menjadi daerah yang terdepan dalam inovasi, Pembangunan, dan Pelayanan Publik”** dengan sasaran **“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih”**. Berdasarkan tujuan dan sasaran dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, rumusan Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dalam penyelenggaraan pelayanan publik yaitu **“Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efesien dengan indikator tujuan :**

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan.
2. Indeks Persepsi Anti Korupsi
3. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan

3.2. Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Adapun sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dalam penyelenggaraan pelayanan publik yaitu :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan tertib administrasi kependudukan.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah.

Berikut tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ingin di capai dalam 5 (lima) tahun sebagai mana tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang profesional dan bersih	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efisien dan Efektif		Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	93,00	94,00	95,00	96,00	96,50	97,00	
			Indeks persepsi anti korupsi	3,60	3,65	3,70	3,75	3,80	3,80	
			Indeks persepsi kualitas pelayanan	3,25	3,30	3,35	3,4	3,45	3,45	
		Meningkatnya kesadaran Masyarakat akan tertib administrasi kependudukan	Nilai peningkatan layanan pendaftaran penduduk	4	4	4	4	4	4	
			Nilai Peningkatan layanan Pencatatan Sipil	4	4	4	4	4	4	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang terpenuhi (%)	90	92	93	95	98	100	
			Persentase Kerjasama pemanfaatan data layanan administrasi kependudukan	36,58%	39,02%	43,90%	48,78%	53,65%	53,65%	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP	A	A	A	A	A	A	

3.3. Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi adalah rencana umum atau arah tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Strategi ini menjelaskan langkah-langkah besar atau pendekatan yang akan diambil, dan kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan-kebijakan yang lebih spesifik, yang akan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik
- b. Peningkatan keamanan sistem informasi
- c. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pengguna data
- d. Peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia
- e. Penyelenggaraan pelatihan/bimbingan teknis terkait perkembangan teknologi informasi
- f. Transformasi arsip manual menjadi arsip digital
- g. Monitoring dan evaluasi kinerja secara intensif

Tahapan dalam pencapaian tujuan dan sasaran di gambarkan pada tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2
Tahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik
Peningkatan keamanan sistem informasi	Peningkatan keamanan sistem informasi	Peningkatan keamanan sistem informasi	Peningkatan keamanan sistem informasi	Peningkatan keamanan sistem informasi
Peningkatan kerjasama dengan lembaga pengguna data	Peningkatan kerjasama dengan lembaga pengguna data	Peningkatan kerjasama dengan lembaga pengguna data	Peningkatan kerjasama dengan lembaga pengguna data	Peningkatan kerjasama dengan lembaga pengguna data
Peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia	Peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia	Peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia	Peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia	Peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia
Penyelenggara an pelatihan / bimbingan teknis terkait perkembangan teknologi informasi	Penyelenggara an pelatihan / bimbingan teknis terkait perkembangan teknologi informasi	Penyelenggara an pelatihan / bimbingan teknis terkait perkembangan teknologi informasi	Penyelenggara an pelatihan / bimbingan teknis terkait perkembangan teknologi informasi	Penyelenggara an pelatihan / bimbingan teknis terkait perkembangan teknologi informasi
Monitoring dan evaluasi kinerja secara intensif	Monitoring dan evaluasi kinerja secara intensif	Monitoring dan evaluasi kinerja secara intensif	Monitoring dan evaluasi kinerja secara intensif	Monitoring dan evaluasi kinerja secara intensif

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatnya layanan pendaftaran penduduk
 - Melaksanakan pelayanan perekaman KTP Elektronik
 - Melaksanakan pelayanan pembuatan KIA baru
 - Melaksanakan pelayanan aktivasi IKD
 - Melaksanakan sosialisasi layanan pendaftaran penduduk
2. Meningkatnya layanan pencatatan sipil
 - Melaksanakan pelayanan penerbitan akta kelahiran
 - Melaksanakan pelayanan penerbitan akta perkawinan
 - Melaksanakan pelayanan penerbitan akta perceraian
 - Melaksanakan pelayanan penerbitan akta kematian dan penerapan buku pokok pemakaman
 - Melaksanakan sosialisasi pelayanan pencatatan sipil
3. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan
 - Mengadakan sarana dan prasarana pelayanan
 - Melaksanakan pembangunan dan pengembangan sarana layanan (aplikasi) sesuai dengan kebutuhan
 - Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan secara rutin
4. Meningkatnya kualitas database kependudukan
 - Tersediannya database kependudukan skala kabupaten
 - Melaksanakan verifikasi layanan administrasi kependudukan
5. Meningkatnya kompetensi petugas pelayanan
 - Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis/workshop/Coaching Clinic
6. Meningkatkan minat pemanfaatan data oleh perangkat daerah
 - Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan data kepada perangkat daerah

- Melaksanakan kerjasama pemanfaatan data dengan perangkat daerah
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan data terhadap perangkat daerah
7. Meningkatkan minat pemanfaatan data oleh mitra kerja
- Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan data kepada mitra kerja
 - Melaksanakan kerjasama pemanfaatan data dengan mitra kerja
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan data terhadap mitra kerja
8. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai terkait penatausahaan perencanaan, keuangan dan umum kepegawaian
- Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
 - Melaksanakan penyusunan dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja
 - Melaksanakan penyusunan dokumen pelayanan administrasi keuangan
 - Melaksanakan penatausahaan keuangan
 - Melaksanakan pelayanan administrasi umum
 - Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian

3.4 Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dalam rangka pelaksanaan strategi selaras dengan RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. (PMDN 86 2017, Psl 12 ayat 2). Sebelum Menyusun kebijakan renstra terlebih dahulu dilakukan pendalaman terhadap kebijakan yang ada di RPJMD, tabel 3.3

di bawah ini yang menjadi dasar perumusan kebijakan renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

1. Optimalisasi pelayanan publik;
2. Sertifikasi Sistem manajemen Keamanan Informasi melalui ISO 27001;
3. Membangun kerjasama dengan multipihak pengguna data
4. Optimalisasi jumlah dan kompetensi pegawai melalui usulan kebutuhan pegawai dan pelatihan/bimbingan teknis
5. Penguatan petugas pengguna aplikasi terkait administrasi kependudukan melalui pelatihan / bimbingan teknis;
6. Mewujudkan digitalisasi arsip;
7. Optimalisasi monitoring dan evaluasi kinerja;

Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat di sajikan pada tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Rencana Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong

No.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan bersih	Peningkatan digitalitas layanan publik melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik dan penerapan satu data	Optimalitas pelayanan publik	
		Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran dan pengadaan barang/ jasa serta transparansi layanan berbasis digital	Optimalitas monitoring dan evaluasi kinerja	

No.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan	Membangun kerjasama dengan multipihak penggunaan data dan layanan Kependudukan	
			Penguatan petugas penggunaan aplikasi terkait administrasi kependudukan melalui pelatihan /bimbingan teknis	
			Optimalitas jumlah dan kompetensi pegawai melalui usulan kebutuhan pegawai melalui usulan kebutuhan pegawai dan pelatihan/bimbingan teknis	
			Mewujudkan digitalisasi arsip	

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong menerapkan arah kebijakan strategis yang difokuskan pada optimalisasi pelayanan publik, optimalisasi monitoring dan evaluasi kinerja, manajemen keamanan informasi dan penjelasan tentang arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; serta Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Sebagai bentuk implementasi dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan rencana ini juga memperhatikan tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah; tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); serta mekanisme perubahan atas dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tersebut.

Lebih lanjut, penyusunan dokumen ini mengikuti arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

Selain itu, rencana program dan kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjalankan fungsi pelayanan administrasi kependudukan.

Dalam dokumen rencana strategis ini, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong termuat pada Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang 2025-2029 adalah sebagai berikut :

4.1 Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong sesuai dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 pada priode renstra 2025-2029 ada 5 (lima) program terdiri dari :

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Berikut program perangkat daerah pada rancangan akhir renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, sebagaimana tabel 4.1 dan 4.2 berikut ini :

TABEL 4.1
PROGRAM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PADA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					16.421.072.523		17.768.421.300		19.226.320.000		20.803.839.400		22.510.794.200	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.688.715.444		13.729.824.500		14.856.356.600		16.075.320.600		17.394.300.600	
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	12.688.715.444	100	13.729.824.500	100	14.856.356.600	100	16.075.320.600	100	17.394.300.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					610.920.023		661.046.000		715.284.800		773.973.900		837.478.400	
Meningkatnya Kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	79,84	80	85	610.920.023	90	661.046.000	95	715.284.800	100	773.973.900	100	837.478.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	2,74	5	10		15		20		25		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk-Elektronik (%)	99,75	99,8	99,85		99,9		99,95		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					243.928.400		263.942.700		285.599.100		309.032.500		334.388.600	

Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun (%)	99,11	100	100	243.929.400	100	263.942.700	100	285.599.100	100	309.032.500	100	334.388.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	63,69	75	75,38		75,76		76,14		76,52		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Buku Pokok Pemakaman (BPP) yang dilindatkanjuli (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					2.606.804.658		2.620.692.900		3.052.130.700		3.302.558.000		3.573.532.800	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	26,82	36,68	39,02	2.606.804.658	43,9	2.620.692.900	48,76	3.052.130.700	53,65	3.302.558.000	53,95	3.573.532.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Informasi Kependudukan yang Dikelola (%)	90	92	93		95		98		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					270.704.000		292.915.200		316.948.800		342.954.400		371.093.800	

Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	100	270.704.000	100	292.915.200	100	316.948.800	100	342.954.400	100	371.093.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
TOTAL KESELURUHAN					16421072523.00		17768421300.00		19226320000.00		20803939400.00		22510794200.00	

4.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang berkesimbangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang mencakup fungsi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, sebagai mana tabel 4.2 dan tabel 4.3 sebagai berikut :

TABEL 4.2
MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TABALONG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efisien dan efektif				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)		
					Indeks Persepsi Anti Korupsi (Indeks)		
					Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (Indeks)		
		Meningkatnya kesadaran masyarakat akan tertib administrasi kependudukan			Nilai Peningkatan Layanan Pendaftaran Penduduk (Nilai)		
					Nilai Peningkatan Layanan Pencatatan Sipil (Nilai)		
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
		Meningkatnya Kualitas layanan pendaftaran penduduk			Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk-Elektronik (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	

				Terlaksananya pelayanan dokumen pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	

					Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.01.0005 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
				Terlaksanannya pengadaan bahan untuk cetak dokumen kependudukan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	2.12.02.2.02.0002 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	
				Terlaksanannya penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	

					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0005 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	
				Terlaksananya Pengawasan Terhadap Dokumen Kependudukan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.04.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil		Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun (%)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	

					Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase Buku Pokok Pemakaman (BPP) yang ditindaklanjuti (%)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Terlaksananya pelayanan penerbitan akta kelahiran	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	2.12.03.2.01.0005 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	
				Terlaksananya pelayanan penerbitan akta perkawinan dan pelayanan penerbitan akta perceraian	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	

					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)	2.12.03.2.02.0001 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02.0008 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	
				Tertindakannya pelayanan akta kematian dan penerapan buku pokok pemakaman	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	

					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	2.12.03.2.03.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan			Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang terpenuhi (%)		
					Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan (%)		
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan		Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
					Persentase Informasi Kependudukan yang Dikelola (%)	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
				Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	

					Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	
				Terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03.0003 - Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Tertaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.04.0001 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan		Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
				Meningkatnya kualitas profil dan data kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan	
					Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah			Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)		

			Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah		Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.12.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	
				Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.12.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

				Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, mutakhir dan terdokumentasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.12.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.12.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.12.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terselenggaranya pelayanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan efisien	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.12.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Tersedianya barang milik daerah hasil pengadaan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan perangkat daerah dan ketentuan yang berlaku	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya kondisi barang milik daerah agar tetap layak pakai dan berfungsi optimal	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.12.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpeliharanya kondisi barang milik daerah agar tetap layak pakai dan berfungsi optimal	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

TABEL 4.3
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL KABUPATEN TABALONG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				16.421.072.523		17.768.421.300		19.226.320.000		20.803.839.400		22.510.794.200		
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.688.715.444		13.729.824.500		14.856.356.600		16.075.320.600		17.394.300.600		
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	12.688.715.444	100	13.729.824.500	100	14.856.356.600	100	16.075.320.600	100	17.394.300.600	2.12.0.00.0.00 .01.0000 - DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATA N SIPIL	
2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				28.321.168		28.547.734		29.581.846		29.818.499		35.057.045		
Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	45	45	28.321.168	45	28.547.734	45	29.581.846	45	29.818.499	45	35.057.045		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			

	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.690.560		6.744.084		7.603.770		7.664.600		8.725.916		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	6.690.560	2	6.744.084	2	7.603.770	2	7.664.600	2	8.725.916		
2.12.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.124.230		3.149.223		3.174.416		3.199.811		4.225.409		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.124.230	1	3.149.223	1	3.174.416	1	3.199.811	1	4.225.409		
2.12.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.124.230		3.149.223		3.174.416		3.199.811		4.225.409		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.124.230	1	3.149.223	1	3.174.416	1	3.199.811	1	4.225.409		
2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11.004.548		11.092.584		11.181.324		11.270.774		12.360.940		

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	11.004.548	5	11.092.584	5	11.181.324	5	11.270.774	5	12.360.940		
2.12.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				4.377.600		4.412.620		4.447.920		4.483.503		5.519.371		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	45	45	4.377.600	45	4.412.620	45	4.447.920	45	4.483.503	45	5.519.371		
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.608.243.000		8.682.108.944		8.751.565.815		8.956.578.341		8.993.150.967		
Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	-	8.608.243.000	1	8.682.108.944	1	8.751.565.815	1	8.956.578.341	1	8.993.150.967		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	40		40		40		40		40			
2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.608.243.000		8.677.108.944		8.746.525.815		8.951.498.021		8.987.030.005		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	40	8.608.243.000	40	8.677.108.944	40	8.746.525.815	40	8.951.498.021	40	8.987.030.005		
2.12.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		5.000.000		5.040.000		5.080.320		6.120.962		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	-	0	1	5.000.000	1	5.040.000	1	5.080.320	1	6.120.962		

2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.254.387.000		1.349.877.096		1.360.676.111		1.388.561.518		1.410.534.008		
Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, mutakhir dan terdokumentasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	15	70	1.254.387.000	70	1.349.877.096	70	1.360.676.111	70	1.388.561.518	70	1.410.534.008		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	63	3		3		3		3		3			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	-		6		6		6		6			
2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				158.850.000		160.120.800		161.401.766		172.692.980		173.994.523		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	63	3	158.850.000	3	160.120.800	3	161.401.766	3	172.692.980	3	173.994.523		
2.12.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		85.455.000		86.138.640		86.827.749		87.522.370		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	-	0	6	85.455.000	6	86.138.640	6	86.827.749	6	87.522.370		
2.12.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				31.575.000		31.827.600		32.082.220		39.338.877		40.597.588		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4	4	31.575.000	4	31.827.600	4	32.082.220	4	39.338.877	4	40.597.588		

2.12.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1.063.962.000		1.072.473.696		1.081.053.485		1.089.701.912		1.108.419.527		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	15	70	1.063.962.000	70	1.072.473.696	70	1.081.053.485	70	1.089.701.912	70	1.108.419.527		
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				781.644.033		1.106.669.186		1.522.882.536		1.905.724.139		1.621.573.845		
Terselenggaranya pelayanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan efisien	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8	-	781.644.033	27	1.106.669.186	27	1.522.882.536	27	1.905.724.139	27	1.621.573.845		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	336		336		336		336		336			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	163	55		55		55		55		55			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	11	10		10		10		10		10			

2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.774.550		8.844.746		17.915.503		19.088.827		19.113.872	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1	8.774.550	1	8.844.746	1	17.915.503	1	19.088.827	1	19.113.872	
2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				276.843.139		479.057.884		691.250.347		875.290.669		725.394.594	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	11	10	276.843.139	10	479.057.884	10	691.250.347	10	875.290.669	10	725.394.594	
2.12.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		61.272.002		250.762.178		417.796.500		280.432.520	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6	-	0	27	61.272.002	27	250.762.178	27	417.796.500	27	280.432.520	
2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				25.536.400		25.740.691		25.946.616		35.354.188		35.363.421	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5	25.536.400	5	25.740.691	5	25.946.616	5	35.354.188	5	35.363.421	
2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.580.000		5.624.640		5.669.637		6.614.995		6.760.713	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	336	5.580.000	336	5.624.640	336	5.669.637	336	6.614.995	336	6.760.713	
2.12.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				25.240.944		25.442.871		25.646.413		29.851.584		29.058.396	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	10	25.240.944	10	25.442.871	10	25.646.413	10	29.851.584	10	29.058.396	
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				439.669.000		443.186.352		446.731.842		461.305.696		462.559.260	

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	163	55	439.669.000	55	443.186.352	55	446.731.842	55	461.305.696	55	462.559.260	
2.12.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		57.500.000		58.960.000		61.423.680		62.891.069	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	0	0	1	57.500.000	1	58.960.000	1	61.423.680	1	62.891.069	
2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				195.636.000		489.701.588		552.217.336		864.019.269		2.399.296.783	
Tersedianya barang milik daerah hasil pengadaan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan perangkat daerah dan ketentuan yang berlaku	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	195.636.000	1	489.701.588	1	552.217.336	1	864.019.269	1	2.399.296.783	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	-		6		6		6		6		
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	-	-		10		10		10		10		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	-		-		-		-		1		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	-		-		-		-		5		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-		1		1		1		1		
2.12.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		0		206.000.000	

Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	5	206.000.000	
2.12.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		0		1.326.437.182	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	-	0	-	0	-	0	-	0	1	1.326.437.182	
2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		26.300.500		85.109.040		162.130.000		162.247.680	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	-	0	6	26.300.500	6	85.109.040	6	162.130.000	6	162.247.680	
2.12.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		69.000.000		69.552.000		80.532.190		80.669.283	
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	-	-	0	10	69.000.000	10	69.552.000	10	80.532.190	10	80.669.283	
2.12.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		197.200.000		198.777.600		300.367.820		301.970.762	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	0	1	197.200.000	1	198.777.600	1	300.367.820	1	301.970.762	
2.12.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				195.636.000		197.201.088		198.778.696		320.989.259		321.971.876	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	195.636.000	1	197.201.088	1	198.778.696	1	320.989.259	1	321.971.876	
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.270.094.243		1.280.254.996		1.718.329.656		1.889.692.475		1.891.472.998	

Tersedianya jasa penunjang kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	36	1.270.094.243	36	1.280.254.996	36	1.718.329.656	36	1.889.692.475	36	1.891.472.998		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	6		6		6		6		6			
2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				600.000		604.800		609.638		615.515		619.431		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	6	600.000	6	604.800	6	609.638	6	615.515	6	619.431		
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				170.000.000		171.360.000		266.705.000		279.730.880		280.112.727		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	36	170.000.000	36	171.360.000	36	266.705.000	36	279.730.880	36	280.112.727		
2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.099.494.243		1.108.290.196		1.451.015.018		1.609.346.080		1.610.740.840		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	3	1.099.494.243	3	1.108.290.196	3	1.451.015.018	3	1.609.346.080	3	1.610.740.840		
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				550.390.000		792.664.956		921.103.300		1.040.926.359		1.043.214.954		
Terpeliharanya kondisi barang milik daerah agar tetap layak pakai dan berfungsi optimal	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	35	550.390.000	35	792.664.956	35	921.103.300	35	1.040.926.359	35	1.043.214.954		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-		1		1		1		1		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	19	37		37		37		37		37		
2.12.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				42.750.000		43.092.000		43.436.736		51.784.229		52.134.502	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	42.750.000	1	43.092.000	1	43.436.736	1	51.784.229	1	52.134.502	
2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				477.100.000		480.916.800		484.764.134		501.642.247		502.551.384	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	35	477.100.000	35	480.916.800	35	484.764.134	35	501.642.247	35	502.551.384	
2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.540.000		30.784.320		55.030.594		80.499.883		80.529.068	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	19	37	30.540.000	37	30.784.320	37	55.030.594	37	80.499.883	37	80.529.068	
2.12.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		237.871.836		337.871.836		407.000.000		408.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	0	1	237.871.836	1	337.871.836	1	407.000.000	1	408.000.000	

2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				610.920.023		661.046.000		715.284.800		773.973.900		837.478.400		
Meningkatnya Kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	79,84	85	610.920.023	90	661.046.000	95	715.284.800	100	773.973.900	100	837.478.400	2.12.0.00.0.00 .01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk-Elektronik (%)	99,42	99,85		99,9		99,95		100		99			
	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	2,74	10		15		20		25		30			
2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk				262.737.600		301.268.145		176.458.365		398.427.119		218.191.185		
Terlaksananya pelayanan dokumen pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	2	4	262.737.600	4	301.268.145	4	176.458.365	4	398.427.119	4	218.191.185		
	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	60	60		65		65		65		65			
	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	36.000	39.000		39.000		39.000		39.000		39.000			
2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				14.767.800		30.060.425		34.569.488		39.754.911		25.000.000		
Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	2	4	14.767.800	4	30.060.425	4	34.569.488	4	39.754.911	4	25.000.000		

2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				0		10.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	36.000	39.000	0	39.000	10.000.000	39.000	15.000.000	39.000	15.000.000	39.000	20.000.000		
2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				247.969.800		252.991.821		117.440.594		332.806.683		160.695.832		
Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	12	12	247.969.800	12	252.991.821	12	117.440.594	12	332.806.683	12	160.695.832		
2.12.02.2.01.0005 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				0		8.215.899		9.448.283		10.865.525		12.495.353		
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	60	60	0	65	8.215.899	65	9.448.283	65	10.865.525	65	12.495.353		
2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk				219.066.627		313.317.443		251.396.962		327.002.888		329.461.739		
Terlaksananya pengadaan bahan untuk cetak dokumen kependudukan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	0	4	219.066.627	4	313.317.443	4	251.396.962	4	327.002.888	4	329.461.739		
2.12.02.2.02.0002 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan				219.066.627		313.317.443		251.396.962		327.002.888		329.461.739		

Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-E, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-E, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	0	4	219.066.627	4	313.317.443	4	251.396.962	4	327.002.888	4	329.461.739	
2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				119.781.596		40.000.000		280.000.000		40.000.000		280.000.000	
Terlaksananya penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	-	1	119.781.596	-	40.000.000	12	280.000.000	-	40.000.000	12	280.000.000	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk (Laporan)	-	4		4		4		4		4		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	12	4		4		4		4		4		
2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				9.817.800		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	12	4	9.817.800	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	
2.12.02.2.03.0003 - Fasilitas Pendaftaran Penduduk				29.617.800		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk (Laporan)	-	4	29.617.800	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	
2.12.02.2.03.0005 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				80.345.996		0		240.000.000		0		240.000.000	

Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	-	1	80.345.996	-	0	12	240.000.000	-	0	12	240.000.000		
2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				9.334.200		6.460.412		7.429.473		8.543.893		9.825.476		
Terlaksananya Pengawasan Terhadap Dokumen Kependudukan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataan Penduduk (Laporan)	1	12	9.334.200	12	6.460.412	12	7.429.473	12	8.543.893	12	9.825.476		
2.12.02.2.04.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk				9.334.200		6.460.412		7.429.473		8.543.893		9.825.476		
Terbinanya dan Terawasinya Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataan Penduduk (Laporan)	1	12	9.334.200	12	6.460.412	12	7.429.473	12	8.543.893	12	9.825.476		
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				243.928.400		263.942.700		285.599.100		309.032.500		334.388.600		
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100	243.928.400	100	263.942.700	100	285.599.100	100	309.032.500	100	334.388.600	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	63,89	75,38		75,76		76,14		76,52		77			
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun (%)	99,11	100		100		100		100		100			
	Persentase Buku Pokok Pemakaman (BPP) yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100			

2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil				168.012.000		155.647.243		186.710.856		184.455.421		214.427.383		
Terlaksananya pelayanan penerbitan akta kelahiran	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	-	4	168.012.000	4	155.647.243	4	186.710.856	4	184.455.421	4	214.427.383		
	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	26,586	19,12		19,12		19,12		19,12		19,12			
2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				118.012.000		125.647.243		146.710.856		134.455.421		153.931.638		
Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	26,586	19,12	118.012.000	19,12	125.647.243	19,12	146.710.856	19,12	134.455.421	19,12	153.931.638		
2.12.03.2.01.0005 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan				50.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000		60.495.745		
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	-	4	50.000.000	4	30.000.000	4	40.000.000	4	50.000.000	4	60.495.745		
2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				69.616.400		101.365.457		85.888.244		115.919.499		90.005.000		
Terlaksananya pelayanan penerbitan akta perkawinan dan pelayanan penerbitan akta perceraian	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil (Laporan)	-	1	69.616.400	1	101.365.457	1	85.888.244	1	115.919.499	1	90.005.000		
	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	-	-		1		-		1		-			

	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)	12	1		1		1		1		1			
2.12.03.2.02.0001 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				27.560.000		20.000.000		27.000.000		27.305.749		30.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)	12	1	27.560.000	1	20.000.000	1	27.000.000	1	27.305.749	1	30.000.000		
2.12.03.2.02.0006 - Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil				42.056.400		46.262.040		58.888.244		50.000.000		60.005.000		
Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil (Laporan)	-	1	42.056.400	1	46.262.040	1	58.888.244	1	50.000.000	1	60.005.000		
2.12.03.2.02.0008 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil				0		35.103.417		0		38.613.750		0		

Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	-	-	0	1	35.103.417	-	0	1	38.613.750	-	0			
2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				6.300.000		6.930.000		13.000.000		8.657.580		29.956.217			
Terlaksananya pelayanan akta kematian dan penerapan buku pokok pemakaman	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	12	12	6.300.000	12	6.930.000	12	13.000.000	12	8.657.580	12	29.956.217			
2.12.03.2.03.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				6.300.000		6.930.000		13.000.000		8.657.580		29.956.217			
Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	12	12	6.300.000	12	6.930.000	12	13.000.000	12	8.657.580	12	29.956.217			
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				2.606.804.656		2.820.692.900		3.052.130.700		3.302.558.000		3.573.532.800			
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dikelola (%)	92	93	2.606.804.656	95	2.820.692.900	98	3.052.130.700	100	3.302.558.000	100	3.573.532.800	2.12.0.00.0.00 .01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	26,82	39,02		43,9		48,78		53,65		53,65				
2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				377.508.656		368.465.100		354.680.120		335.362.362		309.617.598			
Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	14	16	377.508.656	18	368.465.100	20	354.680.120	22	335.362.362	24	309.617.598			

	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	-	-		18		20		22		24		
2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				0		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	
Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	-	-	0	18	60.000.000	20	60.000.000	22	60.000.000	24	60.000.000	
2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				377.508.656		308.465.100		294.680.120		275.362.362		249.617.598	
Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	14	16	377.508.656	18	308.465.100	20	294.680.120	22	275.362.362	24	249.617.598	
2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1.391.300.395		1.607.528.230		1.761.535.058		1.910.467.801		2.156.733.542	
Terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2	2	1.391.300.395	2	1.607.528.230	2	1.761.535.058	2	1.910.467.801	2	2.156.733.542	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
2.12.04.2.03.0003 - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1.205.103.028		1.416.841.285		1.551.346.618		1.663.765.854		1.886.336.042	
Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	1	1.205.103.028	1	1.416.841.285	1	1.551.346.618	1	1.663.765.854	1	1.886.336.042	
2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				186.197.367		190.686.945		210.188.440		246.701.947		270.397.500	

Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2	2	186.197.367	2	190.686.945	2	210.188.440	2	246.701.947	2	270.397.500		
2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				837.995.605		844.699.570		935.915.522		1.056.727.837		1.107.181.660		
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	2	2	837.995.605	2	844.699.570	2	935.915.522	2	1.056.727.837	2	1.107.181.660		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
2.12.04.2.04.0001 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				346.846.000		349.620.768		436.876.090		496.696.090		521.669.659		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	4	4	346.846.000	4	349.620.768	4	436.876.090	4	496.696.090	4	521.669.659		
2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				491.149.605		495.078.802		499.039.432		560.031.747		585.512.001		

Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	2	2	491.149.605	2	495.078.802	2	499.039.432	2	560.031.747	2	585.512.001		
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				270.704.000		292.915.200		316.948.800		342.954.400		371.093.800		
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	270.704.000	100	292.915.200	100	316.948.800	100	342.954.400	100	371.093.800	2.12.0.00.0.00 .01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan				270.704.000		292.915.200		316.948.800		342.954.400		371.093.800		
Meningkatnya kualitas profil dan data kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	3	2	270.704.000	2	292.915.200	2	316.948.800	2	342.954.400	2	371.093.800		
	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota				117.000.000		127.936.000		138.959.488		152.071.164		166.287.733		
Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	117.000.000	2	127.936.000	2	138.959.488	2	152.071.164	2	166.287.733		
2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain				153.704.000		164.979.200		177.989.312		190.883.236		204.806.067		
Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	3	2	153.704.000	2	164.979.200	2	177.989.312	2	190.883.236	2	204.806.067		

4.3 Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029. Sebagai tolok ukur kinerja agar memudahkan pengukuran kinerja, terdapat indikator kinerja. Turunan dari indikator kinerja Pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab Disdukcapil Kabupaten Tabalong menjadi bagian dalam dokumen ini. Indikator kinerja dimaksud memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk merealisasikan pencapaiannya pada akhir periode Renstra. Indikator kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong telah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 sebagaimana dalam Tabel 4.4, Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 berikut ini :

TABEL 4.4
DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TABALONG

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1.	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya Kualitas layanan pendaftaran penduduk	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
			2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.01.0005 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
			2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.02.0002 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	
			2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	

			2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.03.0003 - Fasilitas Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.03.0005 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.04.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	
2.	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	
			2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
			2.12.03.2.01.0005 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	
			2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
			2.12.03.2.02.0001 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	
			2.12.03.2.02.0006 - Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil	
			2.12.03.2.02.0008 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	
			2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
3.	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
			2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
			2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	
			2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			2.12.04.2.03.0003 - Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			2.12.04.2.04.0001 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	

4.	2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan	
			2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	
			2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029 diharapkan mampu memberikan arah perencanaan pembangunan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, penyelenggaraan pemerintah dapat selaras dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akutabilitas kinerja. Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029 adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029 dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tabalong. Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 4.3 sebagai berikut:

TABEL 4.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TABALONG

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	92,27	93	94	95	96	96	96	
3.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks	3,6	3,6	3,65	3,7	3,75	3,8	3,8	
4.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	Indeks	3,2	3,25	3,3	3,35	3,4	3,45	3,45	
5.	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A	A	A	
6.	Nilai Peningkatan Layanan Pendaftaran Penduduk	Nilai	3	4	4	4	4	4	4	
7.	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang terpenuhi	%	90	92	93	95	98	100	100	
8.	Nilai Peningkatan Layanan Pencatatan Sipil	Nilai	3	4	4	4	4	4	4	
9.	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	26,82	36,58	39,02	43,9	48,78	53,65	53,65	

TABEL 4.6
INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN AKHIR RENSTRA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TABALONG

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama	komulatif	%	11	15	16	18	20	22	24	
2	Kepemilikan akta kelahiran	komulatif	%	65,03	75	75,38	75,76	76,14	76,52	77	
3	Perekaman KTP - elektronik	komulatif	%	99,75	99,8	99,85	99,9	99,95	100	100	
4	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	komulatif	%	79,84	80	85	90	95	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Disdukcapil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Disdukcapil. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah, dibutuhkan peran aktif para pemangku kepentingan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Disdukcapil Tahun 2025 - 2029 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur, mulai dari pimpinan hingga staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2025 – 2029, maka setiap tahun perlu dilakukan evaluasi.

Demikian Renstra ini disusun agar dapat dipedomani dalam pelaksanaannya.

Tanjung, 20 Agustus 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TABALONG,



Ir. ROWI RAWATIANICE, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661125 199403 2 003